

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. (2016). “Jawa Tengah dan Jawa Timur Dapat Penundaan DAU Terbesar”, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/occdf8382/jawa-tengah-dan-jawa-timur-dapat-penundaan-dau-terbesar>, diakses pada 27 Juni 2022 pukul 10.15 WIB
- Amalia, Afifah Fauziah dan Haryanto. (2019). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2017*. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 8, No, 2, Hal.1, ISSN: 2337-3806.
- Astuti, Widya. (2018). *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2016*. Skripsi. Palembang. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- djpk.kemenkeu.go.id diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 09.28 WIB.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianingrum, Hanum dan Nuwun Priyono. (2022). *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Magelang pada tahun 2006-2021*. Jurnal Economina, Vol. 2, No. 1, e-ISSN: 2963-1181.
- Kanal. (2020). “Dampak Covid19, Pendapatan APBD Jatim Turun”, <https://kanal24.co.id/berita/dampak-covid19-pendapatan-apbd-jatim-turun>, diakses pada 28 Juni 2022 pukul 09.54 WIB.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*, Yogyakarta. Andi.

- Marizka, Reza. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2006-2011*. Skripsi. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Martini, Kadek dan A.A.N.B Dwirandra. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.10, No.2, ISSN: 2302-8556.
- Masrah, Wilda. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Majene*. Skripsi. Makasar. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Mubasiroh, Lailatul. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Musfirati, Anikmah dan Hari Sugiyanto. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Sumber Artikel Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vokasi, Vol. 5, No. 1.
- Ningrum, Nining. (2015). *Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung*. Skripsi. Bandung. Universitas Widayatama.
- Ningsih, Widya Lestari. (2021). "Karesidenan dan Kadipaten, Apa Maksudnya?". <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/09/130000979/karesidenan-dan-kadipaten-apa-maksudnya>, diakses pada 5 November 2022 pukul 13.20 WIB.
- Nurcholis, Hanif (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan DAK tahun 2007.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Permeritah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

RI, Lemhannas. (2019). "Prof. Djohermansyah Djohan: Sentralisasi dan Desentralisasi Harus Seiring Sejalan" <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/737-prof-djohermansyah-djohan-sentralisasi-dan-desentralisasi-harus-seiring-sejalan>, diakses pada 28 Maret 2022 pukul 09.22 WIB.

Sari, Putri Ika. (2015). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas PGRI Yogyakarta.

Setiawan, Puguh, dkk. (2021). *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2016*. Jurnal Menara Ekonomi, Vol. VII, No. 1, ISSN: 2407-8565.

Situmorang, Syafrizal Helmi, et al. (2007). *Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS)*. Medan. USU Press.

Sugiharti, Nova Eki dan Endang Dwi Retnani (2019). *Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 4, e-ISSN: 2460-0585.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Susanti, Dian Budi, Sri Rahayu, dan Siska P. Yudowati. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)*. e-Proceeding of Management, Vol. 3, No. 3, ISSN: 2355-9357.

Sutami, Zelfia Yuliana. (2016). *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2013*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Tjahjono, Achmad dan Rika Oktavianti. (2016). *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah RI Provinsi DIY*. Jurnal

Kajian Bisnis, Vol. 24, No. 1, Hal: 25-34.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Verawaty, Septiani Fransisca, Richa Rahmawati. (2017). *Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah MbiA, Vol.16, No.1, Hal: 1-10.

www.bps.go.id diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB

